OMBUDSMAN KEPRI PANTAU PENYELENGGARAAN PPDB DI KOTA BATAM

Jum'at, 23 Juni 2023 - Reihana Ferdian

BATAM - Mencegah terjadinya penyimpangan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023, Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan pemantauan ke beberapa satuan pendidikan di Kota Batam.

"Sejak awal Juni, kami sudah turun ke beberapa satuan pendidikan di bawah Kanwil Kementerian Agama, selanjutnya kami juga turun ke SD, SMP, selanjutnya nanti SMA/SMK," tutur Adi Permana, selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kepri saat ditemui di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri pada Jumat (23/6/2023).

Berdasarkan pemantauan Ombudsman RI Perwakilan Kepri, hingga saat ini PPDB berjalan cukup lancar, tanpa adanya masalah, namun Adi menyayangkan masih sedikit sekolah yang membuka posko khusus pengaduan terkait penyelenggaraan PPDB.

"Beberapa sekolah yang kami sambangi memang sudah membuka posko khusus PPDB, namun pada saat kami kunjungan ke SMP Negeri 28 Kota Batam, sudah terdapat posko khusus untuk pengaduan terkait PPDB ini. Terdapat ruangan yang diperuntukkan untuk masyarakat datang melakukan konsultasi maupun pengaduan serta direkapitulasi pengaduan tersebut oleh petugas pengelola pengaduan dengan baik," jelasnya.

Oleh karena itu, Adi berharap ke depannya, sekolah-sekolah lain dapat membuka posko pengaduan serupa yang terintegrasi dengan layanan lain pada posko PPDB sehingga memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aduan.

Selanjutnya, Adi membeberkan temuan sementara Ombudsman RI Perwakilan Kepri yaitu terkait Surat Keterangan Domisili sebagai pengganti jika Kartu Keluarga (KK) yang tidak ada.

"Di Kota Batam Surat Keterangan Domisili dapat digunakan sebagai penggati jika KK tidak ada. Padahal pada ketentuan Permendikbud 1 Tahun 2021, Surat Keterangan Domisili hanya dapat digunakan apabila KK tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu. Keadaan tertentu dimaksud meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial. Pada poin inilah orangtua calon siswa bekerja sama dengan beberapa oknum untuk mengupayakan cara sehingga dapat lolos di sekolah yang dituju," ucapnya.

Namun, Adi menjelaskan temuan tersebut perlu dianalisa lebih lanjut oleh Ombudsman Kepri.

"Kami perlu perdalam terkait temuan itu. Oleh karenanya, kami akan lakukan pemantauan ke beberapa sekolah lagi hingga PPDB selesai," tutup Adi Permana.

Untuk diketahui bersama, pengawasan PPDB dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Kepri dilakukan pada setiap tahun ajaran baru. Pengawasan dilakukan pada setiap tahapan PPDB.